

**PARTISIPASI PETANI PADA PENGEMBANGAN
AGROFORESTRY DI AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN
(HKm) DESA KALADI DARUSSALAM KECAMATAN SULI
BARAT KABUPATEN LUWU**

ARSAL ABDULLAH

M012191031



**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PARTISIPASI PETANI PADA PENGEMBANGAN
AGROFORESTRY DI AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN
(HKm) DESA KALADI DARUSSALAM KECAMATAN SULI
BARAT KABUPATEN LUWU**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan Diajukan oleh

ARSAL ABDULLAH

Kepada

**FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

Partisipasi Petani Pada Pengembangan Agroforestry Di Areal
Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kaladi Darussalam
Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Disusun dan diajukan oleh:

ARSAL ABDULLAH
Nomor Pokok : M012191031

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian
Tesis pada tanggal 08 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi
Penasihat

Ketua

Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si

Anggota

Dr. Ir. Svamsuddin Millang, MP

Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,

Mukrimin, S.Hut., MP., Ph.D.

Dekan Fakultas Kehutanan,

Dr. A. Mujetahid M., S. Hut., M. P



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARSAL ABDULLAH
Nomor Pokok Mahasiswa : M012191031
Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Agustus 2022

Yang menyatakan



ARSAL ABDULLAH

ABSTRAK

Arsal Abdullah (M012191031). Partisipasi Petani Pada Pengembangan Agroforestry Di Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kaladi Darussalam Kabupaten Luwu

Partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif dalam rangkaian kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi (Monev). Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan partisipasi petani dalam pengembangan pola agroforestry (2) Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi petani dalam pengembangan agroforestry (3) Merumuskan peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan agroforestry di areal HKm. Metode penelitian bersifat kuantitatif deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang sifatnya eksploratif dan eksplanatif. Lokasi penelitian di wilayah Hutan Kemasyarakatan Sepakat Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kab. Luwu. Jumlah responden 34 orang dari total 333 responden dengan intensitas sampling sebesar 10%. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, survey, wawancara dan dokumentasi, Analisis yang digunakan dengan metode analisis data statistic nonparametris yaitu Metode Analisis SWOT dan Analisis Chi-Square (χ^2). Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Tingkat partisipasi petani didominasi oleh kelas rendah dan tinggi yang di pengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. (2) Partisipasi petani dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tergolong kategori tinggi dan pelaksanaan agroforestry termasuk kelas kategori tinggi disebabkan karena masyarakat secara langsung merasakan manfaat dari kegiatan tersebut, untuk kegiatan monev masuk kategori rendah. (3) Model pengembangan Agroforestry di Hkm Sepakat berbasis Aren. (4) Intervensi kebijakan dalam pembiayaan dan penataan kelembagaan masih sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan HKm yang lebih baik.

Kata Kunci : Tingkat Partisipasi, Agroforestry, Hutan Kemasyarakatan

ABSTRACT

Arsal Abdullah (M012191031). Participation in Agroforestry Development in Community Forest Areas (HKm) Agreed in Kaladi Darussalam Village, West Suli District, Luwu Regency.

Participation is a process that involves all relevant parties actively in a series of activities, both planning, implementation and monitoring and evaluation (Monev). The objectives of this study are (1) to describe the participation of farmers in the development of agroforestry patterns (2) to analyze the supporting factors and inhibiting factors of farmers' participation in the development of agroforestry (3) to formulate an increase in the participation of farmers in the development of agroforestry in HKm areas. The research method is descriptive quantitative, tends to use analysis using an inductive approach and uses quantitative and qualitative approaches that are explorative and explanative. The research location is in the Sepakat Community Forest, Kaladi Darussalam Village, West Suli District, Kab. Luwu. The number of respondents 34 people from a total of 333 respondents with a sampling intensity of 10%. The data was collected by observation, survey, interview and documentation. The analysis used was non-parametric statistical data analysis methods, namely the SWOT Analysis Method and Chi-Square Analysis (x2). The results of this study are: (1) The level of farmer participation is dominated by class low and high which are influenced by the socio-economic conditions of the community (2) The participation of farmers in planning and implementation activities is in the high category and the implementation of agroforestry is in the high category because the community directly feels the benefits of these activities, for monev activities it is in the low category. (3) Agroforestry development model in Aren-based HKm (4) Policy intervention in financing and institutional arrangement is still very much needed to realize better HKm management.

Keywords: Participation Rate, Agroforestry, Community Forest

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, anugerah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini dengan judul **“Partisipasi Petani Pada Pengembangan Agroforestry Di Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.”** Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa umat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan tesis ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si** dan Bapak **Dr. Ir. Syamsuddin Millang, MP** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si**, Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.SE** dan Ibu **Dr. Astuti, S.Hut, M.Si** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan tesis ini.

3. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Irna Mayangsari, S.Hut** yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak **Hasrul, S.Hut, M.Si** selaku Kepala KPH Latimojong atas segala masukan untuk tesis saya dan pengertiannya dalam memberikan Izin untuk menyelesaikan Studi.
6. Bapak **Husin Usuli, S.Hut**, selaku Kepala Subbag TU KPH Lamasi dan Ibu **Karyati, S.Hut** selaku Kasubag TU KPH Latimojong serta **Staf** KPH Latimojong atas segala masukan untuk tesis saya ,dan motivasi serta pengertian untuk saya dalam menyelesaikan Studi.
7. Bapak **Sukardi, A.SN** selaku Ketua HKm Sepakat Kaladi Darussalam atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman angkatan **Pascasarjana Ilmu Kehutanan Angkatan 2019** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga dihaturkan kepada Istri tercinta Fatmah Azis, S.Sos atas pengertiannya yang tetap menguatkan penulis untuk tetap sabar dan berbuat yang terbaik; dan semoga segala pengorbanan yang diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya.

Ucapan khusus penulis haturkan kepada seluruh keluarga besar H. Abdullah Tohibbu (Alm) dan H. Ariani atas dukungan morilnya selama ini. Ayahanda dan Ibunda tercinta Hj. Ariani dengan ketulusan doa, dukungan perhatian dan materinya, serta kasih sayangnnya kepada penulis untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini, khususnya mencapai jenjang pendidikan tinggi.

Akhirnya penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, Agustus 2022

Penulis

Arsal Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR PETA	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Partisipasi.....	8
1. Pengertian Partisipasi	8
2. Bentuk Partisipasi	10
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	11

B. Partisipasi Masyarakat	13
C. Agroforestry	18
D. Hutan Kemasyarakatan (HKm)	24
E. Kerangka Pemikiran	28
III. METODE PENELITIAN.....	29
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	29
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
C. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	30
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Letak dan Luas	40
2. Topografi.....	41
3. Iklim dan Musim	42
4.2 Potensi Areal HKm Sepakat di Desa Kaladi Darussalam dan Kondisi Pengelolaannya	43
1. Luas Areal.....	43
2. Tutupan Lahan.....	45
4.3 Pengelolaan Agroforestry pada Areall HKm Sepakat.....	46
4.4 Identitas Responden Kelompok Tani Hutan	52
1. Umur.....	52
2. Pendidikan.....	54

3. Jumlah Tanggungan Keluarga	56
4. Luas Lahan	58
5. Penghasilan	59
6. Lamanya Tinggal	61
4.5 Bentuk Partisipasi Kelompok Tani Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	62
1. Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan.....	62
2. Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan.....	67
3. Partisipasi Dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi	73
4.6 Klasifikasi Tingkat Partisipasi KTH Pada Pengelolaan HKm.....	75
4.7 Strategi Pengembangan Agroforestri di Areal HKm Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat Kab. Luwu.....	79
4.7.1 Analisis SWOT.....	79
4.7.2 Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan Matriks Eksternal Factor Analysis Summary (IFAS)	82
4.8 Alat Ekonomi Produktif (AEP) Dalam Usaha Pembuatan Gula Semut dan Pemasarannya.....	85
4.9 Analisis Tingkat Partisipasi Petani Pengelola HKm Sepakat.....	91
V. PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pola Penanaman Pada Lokasi Hkm.....	46
Gambar 4.2 Pola Penanaman Agroforestri Model Jalur Pada Lokasi Hkm...	48
Gambar 4.3 Pola Penanaman Model Campuran Pada Lokasi Hkm	49
Gambar 4.4 Analisis SWOT Berdasarkan Skor EFAS Dan IFAS.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tutupan Lahan HKm Sepakat di Desa Kaladi Darussalam.....	44
Tabel 4.2 Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan Perencanaan	64
Tabel 4.3 Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan Pelaksanaan.....	70
Tabel 4.4 Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan MonEv	73
Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi KTH Sepakat dalam Pengelolaan HKm.....	75
Tabel 4.6 Matriks SWOT Strategi Pengembangan Agroforestri di HKm.....	79
Tabel 4.7 Matriks Nilai Skor Interval Strategi Factor Analysis.....	81
Tabel 4.8 Matriks Nilai Skor Eksterval Strategi Factor Analysis	82
Tabel 4.9 Perbandingan Pengolahan Gula Semut Secara Manual dan Menggunakan Mesin.....	87
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Analisis Chi-Square Tingkat Partisipasi Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan MonEv.....	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Klasifikasi Tingkat Umur Kelomok Tani Hutan HKm Sepakat.....	51
Grafik 2. Klasifikasi Tingkat Pendidikan KTH HKm Sepakat.....	54
Grafik 3. Klasifikasi Jumlah Tanggungan Keluarga KTH HKm Sepakat	56
Grafik 4. Klasifikasi Tingkat Luas Lahan KTH HKm Sepakat.....	57
Grafik 5. Klasifikasi Tingkat Penghasilan KTH HKm Sepakat.....	59
Grafik 6. Klasifikasi Tingkat Lamanya Tinggal KTH HKm Sepakat	60
Grafik 7. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan Perencanaan.....	65
Grafik 8. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan Pelaksanaan.....	71
Grafik 9. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan MonEv.....	73

DAFTAR PETA

Peta 4.1 Peta Ketinggian Lokasi HKm Di Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat.....	41
Peta 4.2 Peta Jenis Iklim Lokasi HKm Di Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat	42
Peta 4.3 Peta Penyebaran Anggota Kelompok HKm Sepakat Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat	44
Peta 4.4 Peta Tutupan Lahan Lokasi HKm Sepakat Desa Kaladi Darussalam Kec. Suli Barat	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan hutan yang mampu mengkomodir kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar hutan dapat diterapkan menjadi Konsep Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) (Mirna, 2019). Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.l/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial, serta tidak adanya penyuluhan yang teratur mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan program secara keseluruhan. Hal senada dinyatakan (Suprayitno, 2011), bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan

tergolongan rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan hal mendasar untuk dilakukan dalam mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat dalam pengelolaan hutan (Suprayitno, 2008)

Kurang lebih 35% desa/kelurahan yang ada di Indonesia berada didalam dan disekitar kawasan hutan (Ditjen Planologi 2010). Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat sekitar dan di dalam hutan pada umumnya bercocok tanam dengan membuka hutan untuk perladangan. Peningkatan jumlah penduduk dapat mempengaruhi adanya perubahan kawasan hutan untuk non kehutanan sehingga mempersempit luas lahan hutan akibat adanya perambahan berdampak terjadinya lahan terdegradasi. Adanya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan mendorong akses masyarakat untuk masuk ke dalam hutan mengelola mengakibatkan sempitnya areal untuk bertani (Setyawan, 2010).

Pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan

secara integratif melalui berbagai kegiatan pengelolaan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan (Sagita, 2019)

Konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan KTH hutan kemasyarakatan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, seberapa tinggi keterlibatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat partisipasi petani dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan monitoring. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga (Sagita, 2019). Partisipasi petani dalam mengelola hutan kemasyarakatan merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan HKm sehingga pengelolaan hutan dapat berkembang secara lestari dan berkelanjutan.

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan menggunakan Sistem Agroforestry sejalan dengan landasan utama penyelenggaraan kehutanan yaitu memperhatikan aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat. Bahkan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, Pasal 70). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/MENHUT-II/2007 tentang

Hutan kemasyarakatan menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan yang selanjutnya di singkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4017/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sepakat seluas \pm 2.405 ha pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah anggota kelompok Tani Hutan Sepakat sebanyak 333 Kepala Keluarga yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 290 orang dan perempuan sebanyak 43 orang.

Pelaksanaan pengelolaan areal HKm Sepakat dimaksudkan untuk memberikan akses kepada Desa Kaladi Darussalam dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari dengan prinsip partisipatif untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasinya diperlukan untuk mencapai tujuan. Kelompok Tani Hutan Sepakat yang berada di kawasan hutan lindung Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat

Kabupaten Luwu, masyarakat melakukan pembibitan dan menanam berbagai macam jenis tanaman seperti cengkeh , durian, rambutan, kemiri, aren dan kakao (tanaman perkebunan). Disamping itu masyarakat juga mengelola madu hutan dan pembuatan gula aren serta gula semut.

Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan menyebabkan implementasinya menjadi kurang optimal (Wilujeng, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pada setiap aktivitas HKm tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga tujuan akhir pengelolaan HKm Kaladi Darussalam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yaitu pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan menjadi tidak berjalan.

Penelitian mengenai Partisipasi Petani Hutan Kemasyarakatan pada pengembangan Agroforestry secara umum telah banyak dilakukan seperti oleh (Wilujeng, 2015), (Wiyonoputri, 2014), (Guniastuti *et al*, 2014), (Gunawan *et al*, 2014), (Anomsari, 2013), (Nahdini, 2013) dan (Nugroho, 2011). Penelitian mengenai partisipasi masyarakat (petani) HKm Sepakat pada pengembangan agroforestry di Desa Kaladi Darussalam salah satu alat pembangunan berkelanjutan masih belum banyak dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana partisipasi petani dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan pola sistem agroforestry.
2. Faktor penghambat dan pendukung partisipasi petani dalam pengembangan sistem pola agroforestry di areal hutan kemasyarakatan.
3. Bagaimana merumuskan peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan sistem pola agroferestry di areal hutan kemasyarakatan.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan partisipasi petani dalam pengembangan Sistem agroforestry di areal hutan kemasyarakatan (HKm).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi petani dalam pengembangan Sistem Agroforestry di hutan kemasyarakatan (HKm).
3. Merumuskan peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan Sistem agroforestry di areal hutan kemasyarakatan (HKm).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan terhadap pemerintah daerah dan pihak penyelenggara dalam meningkatkan partisipasi petani dalam pengembangan sistem pola agroforestry di areal hutan kemasyarakatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010).

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (H.A.R.Tilaar, 2009)

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh (Siti Irene Astuti D, 2011), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan

untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh (Siti Irene Astuti D, 2011:58), terbagi atas:

- a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
- b. Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011:58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik, Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha

pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

- b. Partisipasi non fisik, Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (1967) seperti dikutip oleh (Saca Firmansyah, 2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Umur

Faktor umur merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok umur menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok umur lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan di lingkungannya.

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan

berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk menuangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat yang meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).

f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana petani hutan kemasyarakatan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Tingkat partisipasi petani dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Tahapan pengelolaan terdiri dari atas tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya maupun tenaga. Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi petani hutan dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. (Diniyati dan Awang, 2010), faktor internal petani meliputi : umur, pendidikan formal/nonformal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan usaha tani dan pekerjaan sampingan. (Muis, 2007), Faktor eksternal meliputi : penyuluhan kehutanan, dan sumber informasi (Fauzi, 2009). Partisipasi petani dalam mengelola hutan kemasyarakatan merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan hutan rakyat sehingga pengelolaan hutan dapat berkembang secara lestari dan berkelanjutan (Waskito, 2010).

Partisipasi masyarakat di masa depan, tidak hanya menjadi pelengkap dalam pengelolaan hutan, tetapi diarahkan untuk menjadi subyek dalam pengelolaan hutan. Kebijakan pemberian hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan perlu dilanjutkan, baik hak akses maupun hak aset. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan prioritas dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

Sistem desentralisasi di bidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

kegiatan pengelolaan hutan dan diharapkan hutan dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat merupakan konsep pembangunan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan. Keberadaan hutan kemasyarakatan diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2013).

Menurut penelitian (Hidayah, 2012), pengelolaan hutan bersama masyarakat memiliki rangkaian program-program yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan. Program dimaksud mengandung azas kemitraan dan memiliki prinsip untuk menyelaraskan kepentingan antara setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun menurut (Theresia, 2008), partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sikap mendukung dan terlibatnya masyarakat baik secara individu maupun kelompok ke dalam kesatuan bersama untuk merencanakan dan melaksanakan atas dasar tanggung jawab sosial.

Empat macam partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu (1) Partisipasi dalam pembuatan perencanaan dan partisipasi

dalam pengambilan keputusan (2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan (3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dan (4) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.

C. Agroforestry

Agroforestry lahir menjadi salah satu solusi dalam pengembangan pertanian dan kehutanan yang memberi keuntungan terhadap peningkatan sosial-ekonomi dan sekaligus menjaga kondisi lingkungan tetap lestari. Menurut (Nugroho *et.al*, 2011) upaya yang dilakukan ini adalah untuk menyeimbangkan antara tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Secara sederhana agroforestry adalah suatu pola yang berusaha memadukan antara sistem pertanian dan sistem kehutanan. Pola ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai macam tanaman pertanian yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan, peternakan dan perikanan. Agroforestry dicirikan oleh keberadaan komponen pohon dan tanaman semusim dalam ruang dan waktu yang sama (Suryanto; Tohari; & Sabarnurdin, 2005). Menurut (Prasetyo, 2016) sistem agroforestry ini sangat membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan pemanfaatannya melalui fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.

Agroforestry dipandang dari segi ekologi dan ekonomi lebih kompleks daripada sistem monokultur. Sistem agroforestry juga

bersifat lokal, karena harus cocok dengan kondisi ekologi dan sosial ekonomi setempat. Konsep agroforestry memberikan harapan baru dalam sistem pengelolaan lahan, maka petani memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk hutan rakyat yang ditanami dengan beberapa jenis tanaman yang ditanam secara bersama-sama atau bergiliran dalam satu areal.

Program agroforestry yang dilakukan bertujuan untuk pemenuhan dan diversifikasi pangan juga ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sosial kemasyarakatan. Menurut (Triwanto, 2011) dalam pengelolaan hutan mulai disadari bahwa dimensi sosial masyarakat menjadi titik penting dalam pengelolaan hutan. Dalam perkembangannya konsep pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*), selain mempertimbangkan kelestarian ekologis dan ekonomi, juga mensyaratkan terjaminnya fungsi-fungsi sosial masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar hutan. Oleh karena itu, hutan dikategorikan lestari jika syarat kelayakan ekologis, ekonomis dan sosial budaya terpenuhi dengan baik di lapangan.

Agroforestry telah menarik perhatian para peneliti bidang teknis dan sosial tentang pentingnya pengetahuan dasar kombinasi antara pepohonan dengan tanaman, serta segala keuntungan dan kendalanya (Hairiah; Sarjono; & Sabarnurdin, 2003). Menurut

(Mahendra, 2009) agroforestry memberikan manfaat yang signifikan dalam tiga aspek yaitu (1) Aspek ekonomi; sistem agroforestry bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan petani, dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, manajemen yang baik, penerapan pola tanaman yang optimal maka hasil akan melimpah sehingga menjadi solusi atas masalah ekonomi; (2) Aspek sosial budaya; sistem agroforestry memungkinkan seluruh anggota keluarga terlibat dalam pengelolaan, kehidupan sosial terbangun indah, budaya bercocok tanam menjadi budaya semua orang, serta kebijakan pemerintah akan ikut menyesuaikan dengan budaya bercocok tanam masyarakat; dan (3) Aspek ekologi; sistem agroforestry akan menciptakan multi strata tajuk tanaman, mengurangi kerusakan akibat erosi air hujan, peningkatan kesuburan tanah, serta meningkatkan kelimpahan mikro dan makro fauna.

Pengembangan agroforestry diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan, meningkatkan peran serta dan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, pendapatan dan mengentaskan kemiskinan secara terus menerus dan berkelanjutan (Triwanto, 2009a). Perubahan lingkungan daerah tropika berkaitan dengan permasalahan pembukaan hutan alam, erosi, kepunahan flora dan fauna dan perluasan tanah kritis. Semakin beratnya permasalahan tersebut telah mendorong munculnya sebuah ilmu baru yang

berupaya mengenali dan mengembangkan keberadaan sistem agroforestry yang dikembangkan petani di daerah tropika, yaitu ilmu agroforestry. Agroforestry menggabungkan bidang kajian ilmu kehutanan dan agronomi, serta memadukan usaha kehutanan dan pembangunan pedesaan untuk menciptakan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan (Bone, 1977; King 1978; King 1979).

Agroforestry diharapkan berguna dalam usaha mencegah perluasan tanah tandus, kerusakan kesuburan tanah, dan pelestarian sumber daya hutan. Agroforestry juga diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan mutu pertanian serta intensifikasi dan diversifikasi silvikultur (Triwanto, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat (Irwanto, 2007) bahwa dengan pola tanam agroforestry dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah dapat memanfaatkan lahan yang kosong (lahan yang tidak produktif) untuk menanam jenis-jenis tanaman lain (tanaman palawija dan setahun). Ditambahkan oleh (Mayrowani; dan Ashari, 2011) manfaat yang diperoleh dari agroforestry adalah meningkatkan produksi pangan, pendapatan petani, kesempatan kerja, dan kualitas gizi masyarakat bagi kesejahteraan petani sekitar hutan.

Pandangan dan tolak ukur keberhasilan pengembangan agroforestry adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam penerapan sistem agroforestry. Memahami tingkat partisipasi terlebih dahulu harus memahami perspektif masyarakat pada agroforestry. Perspektif merupakan intuisi hati yang terpendam dalam diri individu petani, berisi pandangannya terhadap hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Bisikan hasrat yang ingin dicapai petani tersebut tentunya harus didukung oleh pengambil kebijakan yang nantinya dapat dijadikan program, dengan arah pembangunan yang *bottom up*. Agroforestry yang merupakan pola baru yang diketahui oleh petani, tetapi sebenarnya telah lama diterapkan sejalan dengan peradaban manusia. Diharapkan menurut Noordwijk *et al.* (2004) dari pengembangan agroforestry dapat diperoleh solusi yang saling menguntungkan, baik dari segi kesejahteraan petani, maupun jasa lingkungan yang menjadi hajat hidup masyarakat (Noordwijk *et al.*, 2004)

Pemahaman yang positif dari masyarakat dapat memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan agroforestry, begitupun sebaliknya. Pengembangan agroforestry pada saat ini baru difokuskan pada masyarakat-masyarakat pinggiran hutan. Center for International Forestry Research (2003) mengungkapkan bahwa pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tetap berada di posisi pinggiran, bukan menjadi pilihan pemerintah, khususnya Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditambahkan oleh (Irawan *et al*, & Ekawati, 2017) bahwa persepsi dan perilaku seseorang adalah bentuk karakteristik sosial yang banyak dipertimbangkan untuk mengelola kawasan hutan berbasis masyarakat.

Program pengembangan agroforestry juga memberikan pandangan yang kurang baik kepada petani terutama pada (1) Kesulitan dalam mengkombinasikan tanaman pertanian dan kehutanan; (2) Penerapan pola agroforestry mengurangi luasan pertanaman tanaman semusim yang biasanya petani menanam dengan pola monokultur; (3) Hasil yang didapat dari tanaman tahunan dirasakan sangat lama, sehingga petani enggan untuk menerapkan pola agroforestry; (4) Petani merasa dalam agroforestry sulit menerapkan kebiasaan sanitasi lahan dengan tebang/pangkas-bakar, hal ini karena terdapat tanaman tahunan pada lahan budidaya. Disampaikan juga oleh (Kittur; & Bargali, 2013) bahwa agroforestry dapat meningkatkan produktivitas, manfaat sosial, keuntungan ekonomi, menjaga kelestarian ekologi dan jasa lingkungan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh (Achmad *et al*, & Widyaningsih, 2012) sebahagian besar petani menyatakan bahwa HKm dan hutan rakyat yang dikelola dengan pola agroforestry menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi. Berbagai pendapat yang diberikan oleh masyarakat/petani menyatakan (a) Pengembangan

agroforestry dapat dijadikan sebagai alternatif memulihkan lokasi lahan-lahan yang gersang, dengan memanfaatkan lokasi dapat memberikan kontribusi dalam rehabilitasi lahan yang telah kritis; (b) Aplikasi sistem agroforestry merupakan solusi dalam melestarikan lingkungan disekitar kawasan DAS, sehingga fungsi ekologi hutan dapat kembali sedia kala; (c) Sistem agroforestry berkontribusi dalam menahan erosi dan aliran permukaan pada areal budidaya karena penggunaan berbagai jenis tanaman.

D. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari serta memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Anonim, 2007).

Program hutan kemasyarakatan ini dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman MPTs (Multi Purpose Trees Spesies) dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan tanaman

kayu-kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Melalui program ini lahan yang semula terbuka bisa tertutup kembali oleh tanaman serbaguna (MPTs) dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil Tanaman Serbaguna MPTs tersebut (Arsyad, I; & S. Rahaijo., 2004).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan kreatif dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.

Program HKm baik pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi masih belum menjadi program prioritas sehingga anggaran untuk HKm kurang memadai. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dalam implementasi HKm menjadi terhambat. Menurut (Suhirman dkk, 2012), pemerintah daerah mempunyai peran sentral dalam kebijakan HKm, tidak hanya untuk menerbitkan izin dan pemanfaatan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan fasilitasi bagi pengembangan HKm di wilayahnya mulai perencanaan, inisiasi, pendampingan, pengusulan sampai pembiayaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses kawasan hutan

sebagai tempat mencari penghidupan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran hutan diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKm) agar mereka juga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan sebagai daerah serapan air, dimana pengelolaan HKm harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, yakni 70% dari total lahan garapan harus ditanami pohon besar, sehingga hutan tidak gundul, yang sisanya itu 30% ditanami tanaman bernilai ekonomi, seperti cengkeh, kakao, kopi, kemiri, durian, tanaman umbi-umbian, tanaman obat dan lainnya (Republika, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses (Arifin dkk., 2006; 2009) dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Dwiprabowo dkk., 2013).

Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Tentang Perhutanan Sosial Bab 1, Pasal 1 yang

dimaksud dengan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Hutan Kemitraan. Selain itu adanya prinsip dalam pengelolaan perhutanan sosial yang terdapat pada Pasal 3, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang memperhatikan prinsip : (1) Keadilan (2) Keberlanjutan (3) Kepastian Hukum (4) Partisipatif, dan (5) Bertanggung Jawab.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran partisipasi petani dalam pengembangan Sistem Agroforestry di areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Sepakat.

